

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. .Berdasarkan hasil penelitian, observasi, dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dalam penyediaan akses kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan belum berjalan secara optimal. Hambatan utama disebabkan adanya keterlambatan penyelesaian pembayaran pembangunan gedung Puskesmas Masmambang kepada pihak kontraktor yang mengakibatkan bangunan puskesmas disegel dan belum dapat digunakan. Akibatnya, pelayanan kesehatan masih dilakukan di gedung lama dengan fasilitas yang terbatas. Selain itu, keterbatasan anggaran, kurang optimalnya koordinasi antarinstansi, dan lambatnya penyelesaian masalah pembangunan turut mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan kepada Masyarakat.

2. Ditinjau dari *perspektif Siyasah Tanfidziyah*, keterlambatan pemerintah daerah dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran pembangunan fasilitas kesehatan sehingga menghambat pelayanan masyarakat belum mencerminkan prinsip amanah dan keadilan dalam Islam. Dalam pandangan hukum Islam, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan atau haram karena bertentangan dengan QS. Al-Anfal ayat 27 tentang larangan mengkhianati amanah. Selain itu, prinsip kemaslahatan juga belum terlaksana secara optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma diharapkan segera menyelesaikan permasalahan pembayaran pembangunan gedung Puskesmas Masmambang kepada pihak kontraktor agar bangunan puskesmas dapat segera digunakan untuk

pelayanan kesehatan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

2. Dalam *perspektif Siyasaah Tanfidziyah*, pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan amanah dan tanggung jawabnya secara adil serta mengutamakan kemaslahatan masyarakat melalui penyediaan pelayanan kesehatan yang layak. Hal tersebut sesuai dengan prinsip pemerintahan dalam Islam yang menekankan amanah, keadilan, dan kesejahteraan Masyarakat

Dengan demikian, tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyediaan akses kesehatan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fasilitas kesehatan, tetapi juga penyelesaian permasalahan yang menghambat pelayanan kepada masyarakat. Dalam *perspektif Siyasaah Tanfidziyah*, pemerintah berkewajiban menjalankan amanah dan mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS An -Nahl:90

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS Al-Anfal:27

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS An-Nisa:59

Hadist Riwayat Bukhari Dan Muslim

B. BUKU

Abdillah, Masykuri. *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Acmadi, Abu dan Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2023.

Ahmad Hidayat. *Hukum Tata Negara Islam Kotemporer*. Bandung: Pusaka Setia, 2021

Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CVJejak, 2018.

Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah wa Al-Wilayat Ad-Diniyyah*. Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ed. revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Balaka, Muh. Yani. *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung. 2022.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020.

Edward dalam Widodo. *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Trio Rimba Persada, 2010.

Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

H.A Djazulu. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana. 2003.

Haris, Herdiansyah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Selemba Humanika, 2010.

Hartono, Jogyanto. *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Andi, 2018

Ibnu Taimiyyah. *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyyah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, t.t.

Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017

Monteiro, Jose Manuel, Muhammad Husni. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

Nur, Solikin. *Pengantar Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Rachman, Arif dan Hery. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia, 2022.

Ratna Riyanti. *Hukum Tata Negara: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Nusamedia, 2019.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI

Press, 2020.

Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VI. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Yuliani, Wiwin dan Ecep Supriatna. *Metode Penelitian bagi Pemula*. Bandung: Penerbit Widina, 2023.

C. Skripsi / Jurnal / Karya Ilmiah

Afrizal, Rozi. *Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terhadap Pelayanan Kesehatan bagi Pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Perspektif Fiqh Siyasah*. Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Charismana, Dian Satria, Retnawati Heri, dan Dewantoro Novriza Happri. "Motivasi Belajar dan Prestasi Belajar pada Mata Pelajaran PPKn di Indonesia: Kajian Analisis Meta." *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan*, Vol. 6, No. 2, Desember 2022.

Dedi Afandi. "Hak atas Kesehatan dalam Perspektif HAM." *Jurnal Ilmu Kedokteran*, Vol. 2, No. 1, Maret 2008.

Hapizzudin Pintara. *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi*

Lampung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Siyasa Tanfidziyah. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Irwansyah, Shazlin Fazhira. *“Implementasi Permendagri No. 112 Tahun 2014 terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Siyasa Tanfidziyah.”* Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan, Vol. 9, No. 1, 2023.

Isriawaty. *Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Vol. 23, No. 3, Desember 2015.

Kesuma, Satria Indra. *Ulasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.* Jurnal Nusantara Berbakti, Vol. 2, No. 1, Januari 2024.

Mita, Rosaliza. *Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif.* Jurnal Ilmu Budaya. Vol. 5, No. 2, 2015.

Nidawati. *Dalam Perspektif Islam.* Jurnal Ilmiah Pionir, Vol. 7, No. 2, 2018.

Prawiyogi, Anggy Giri dkk. *Penggunaan Media Big Book untuk Menumbuhkan Minat Membaca di Sekolah Dasar.* Jurnal Basicedu, Vol. 6, No. 2, Maret 2021.

Pratiwi, Shabrina. *Tanggung Jawab Negara terhadap Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Layak*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2015.

Ramidi. Pengantar Metodologi Penelitian. *Journal of Physics A*, Vol. 6, No. 2, 2021.

Riris Katharina. *Relasi Pemerintah Pusat–Pemerintah Daerah dalam Penanganan COVID-19*. *Jurnal Puslit BKD*, Vol. 12, Edisi I, 2020.

Sidiq, Umar dan Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 9, No. 1, 2019.

Sunarto. *Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kearsipan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II*. Skripsi, STIA Satya Negara, 2020.

Syawaludin, Rudi. *Puskesmas Disegel, Dinkes Seluma Rudi: Berkas Pencairan Sudah Diserahkan ke BKD*. Radar Seluma, 24 Februari 2025.

Wahijul Kadri dkk. *Siyasah Syar'iyah & Fiqh Siyasah*. *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 5, No. 2, 2022.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.*

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*

E. Website/Media Online

Radar Seluma. *Puskesmas Disegel, Dinkes Seluma Rudi: Berkas Pencairan Sudah Diserahkan ke BKD.* Diakses 2 Oktober 2025. <https://radarseluma.bacakoran.co/read/10746/puskesmas-disegel-dinkes-seluma-rudi-berkas-pencarian-sudah-diserahkan-ke-bkd>

F. Wawancara

Agus Dermawan, S.E. Kepala Camat Talo. Wawancara, 07

Mei 2026.

Bambang Mirdiansah . Tokoh Agama Desa Masmambang.
Wawancara, 07 Mei 2026.

Esti Kurniawati, S.Pd. Tokoh Agama Setempat. Wawancara,
07 Mei 2026.

Hermawati Sulastri . Masyarakat yang tinggal dekat
puskesmas . Wawancara, 07 Mei 2026.

Ilham Alkadly K, S.H. Analisis Hukum Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma.
Wawancara, 06 Mei 2026.

Juniarti Wahyuni , S.Kep. Perawat Puskesmas Masmambang.
Wawancara, 07 Mei 2026

Noprian Hidayat, S.AP. Kepala Subbagian Perencanaan Dinas
Kesehatan Kabupaten Seluma. Wawancara, 06
Mei 2026

Rudi Syawaludin, S.Sos. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Seluma. Wawancara, 06 Mei 2026

Serjan Mulyadi, S.Pd. Kepala Desa Masmambang.
Wawancara, 07 Mei 2026.

Suapardi Hasanudin, S.Kep. Kepala Puskesmas Masmambang.
Wawancara, 07 Mei 2026

Suharto Rahman . Masyarakat yang Tinggal Dekat Puskesmas
. Wawancara, 07 Mei 2026

Yanto Suparman. Pihak Kontraktor. Wawancara, 08 Mei 2026

